

BAB II

GAMBARAN UMUM KONFLIK TIGRAY PADA MASA PEMERINTAHAN ABIY AHMED (2020-2022)

Berdasarkan latar belakang penelitian, Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai konflik Tigray di Ethiopia pada masa pemerintahan Abiy Ahmed yang berlangsung antara tahun 2020 hingga 2022. Pembahasan dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang geografis dan politik wilayah Tigray, profil kepemimpinan Abiy Ahmed, serta dinamika yang memicu eskalasi konflik bersenjata antara Pemerintah Ethiopia dan *Tigray People's Liberation Front* (TPLF). Selain itu, bab ini juga menguraikan dampak konflik secara politik, sosial, dan kemanusiaan, termasuk keterlibatan aktor eksternal seperti Eritrea. Di akhir, ditampilkan pula peran awal Uni Afrika dalam merespons konflik, sebagai dasar untuk memahami konteks perannya dalam mediasi CoHA yang akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya. Dengan menyajikan latar belakang konflik secara menyeluruh, bab ini menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas dan dinamika diplomasi regional yang dilakukan oleh Uni Afrika.

2.1. Ethiopia

Ethiopia terletak di Afrika bagian timur adalah negara Federasi yang memiliki sebuah ibu kota di Addis Ababa. Ethiopia memiliki nama resmi Republik Demokratik Federal Ethiopia dan terdapat 9 negara di dalamnya,

yaitu: Tigray, Gambela, Afar, Orokia, Somalia, Harari, Gumuz, Addis Ababa dan Dire Dawa.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Ethiopia

Ethiopia adalah negara bagian yang memiliki wilayah terbesar ke-10 di Afrika, yang memiliki beragam suku maupun tradisi di dalamnya yang sangat heterogen. Memiliki suku Amhara, Tigre, Oromo dengan etnis yang memiliki populasi terbesar di Ethiopia, kemudian diikuti Somali, Sidama, Gurage, Wolaita, Afar, Kimbata, Hadiya, dan beberapa etnis lain diperkirakan 28% dari keseluruhan penduduk Ethiopia (Wijayanti, 2022).

Ethiopia, dengan populasi sekitar 110 juta orang, telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa negara ini mengalami perkiraan pertumbuhan sebesar 10% pertahun selama periode 2007–2017. Pertumbuhan ini juga berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan ekstrem hampir setengahnya, dari 61% menjadi 31%. Namun,

meskipun kemajuan tersebut menunjukkan tren positif, Ethiopia saat ini menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah kekeringan berkepanjangan. Kekeringan ini memperburuk situasi kemanusiaan, di mana sekitar 7,4 juta orang dilaporkan memerlukan bantuan pangan pada bulan Agustus 2022 (Evennett 2022).

PM Ethiopia saat ini yaitu Abiy Ahmed, menjalankan roda kekuasaannya pada tahun 2018. Abiy Ahmed berkuasa setelah protes anti pemerintah terhadap koalisi yang berkuasa, Front Demokratik Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF). EPRDF telah berkuasa selama tiga dekade dan koalisi tersebut sebelumnya didominasi oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Berasal dari wilayah Oromia di Ethiopia, Abiy Ahmed awalnya terpilih pada tahun 2010 sebagai anggota Organisasi Demokratik Rakyat Oromo (OPDO), bagian dari EPRDF. Sejak tahun 2014, tindakan pemerintah yang semakin represif telah menyebabkan protes yang meluas terhadap koalisi yang berkuasa. Protes domestik, yang berlanjut selama sekitar tiga tahun hingga awal tahun 2018, berdampak besar pada negara tersebut.

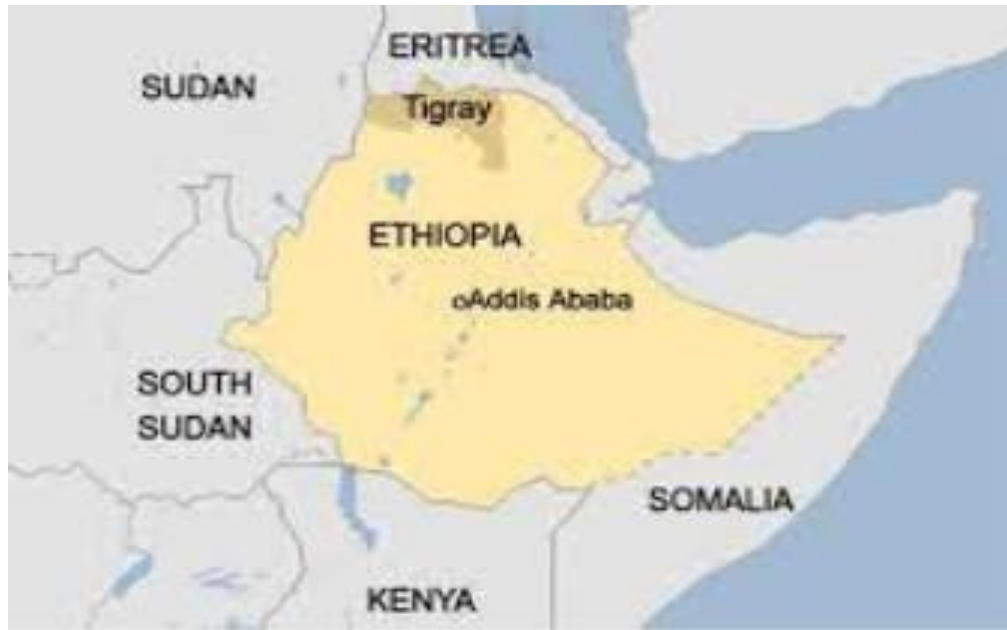
Pada bulan Februari 2018, Perdana Menteri saat itu, Hailemariam Desalegn, mengundurkan diri, dengan alasan perlunya pemimpin baru untuk melanjutkan reformasi dan menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi negara tersebut. Pada bulan Maret 2018, saat Abiy Ahmed terpilih sebagai pemimpin EPRDF, Abiy Ahmed menjanjikan reformasi politik dan transisi menuju pemerintahan yang demokratis. Tahun-tahun awal kekuasaannya menyaksikan pembebasan ribuan tapol dan pencoretan beberapa partai

oposisi dari daftar kelompok teroris. Pada tahun 2019, nobel perdamaian dikarenakan mencapai upaya keamanan serta ketentraman, khususnya pada usahanya dalam mengakhiri sengketa wilayah yang telah berlangsung lama antara negaranya dengan negara tetangga Eritrea (Evennett 2022).

2.2. Tigray

Tigray terletak dari utara Ethiopia dan merupakan wilayah administratif penting negara tersebut. Dengan total populasi sekitar 7 juta jiwa, Tigray memiliki 6.1% pada total masyarakat Ethiopia. Ibu kota wilayah Tigray adalah Mekelle, sebuah kota yang menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan sosial di kawasan tersebut. Secara administratif, wilayah Tigray terdiri dari tujuh zona administratif, yang menjadi pembagian wilayah utama yaitu, 52 distrik, yang terbagi menjadi 34 distrik pedesaan (rural), 18 distrik perkotaan (urban), dan 814 sub-distrik, yang merupakan unit administratif terkecil di wilayah tersebut.

Pembagian administratif ini mencerminkan keragaman geografis dan sosial yang ada di wilayah Tigray, dengan kombinasi daerah urban yang berkembang dan daerah pedesaan yang mayoritas bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, konflik berkepanjangan di wilayah ini telah berdampak signifikan pada struktur administratif, ekonomi, dan sosialnya. Berikut ini adalah peta wilayah Tigray dengan perbatasannya.



Sumber: (Puspita, Fahira, and Andhika, 2022)

Gambar 2.2 Peta Wilayah Tigray

Tigray ini memiliki perbatasan langsung dengan beberapa wilayah serta negara tetangga. Secara geografi, Tigray berbatasan dengan:

Batas Utara : Berbatasan dengan Eritrea

Batas Timur : Afar

Batas Selatan : Amhara

Batas Barat : Republik Sudan

2.3. Kepemimpinan Abiy Ahmed di Ethiopia

2.3.1. Profil Abiy Ahmed

Abiy ahmed lahir 15 Agustus 1976, Beshasha, Ethiopia adalah seorang politikus Ethiopia dari etnis oromo, yang menjadi Perdana Menteri Ethiopia (Septory, 2023) yang dilantik pada April 2018. PM Abiy Ahmed

mendapatkan gelar doktor pada Universitas Addis Ababa dengan fokus kepada studi perdamaian dan memberikan kontribusi pemikiran dengan konsepnya. Pendidikan tersebut turut mempengaruhi pola pikirnya dalam menghadapi tantangan politik dan sosial di Ethiopia, termasuk upaya untuk mengimplementasikan kebijakan reformasi serta penyelesaian konflik internal.

Abiy Ahmed lahir di Beshasha, sebuah kota di wilayah Oromia, Ethiopia. Ayahnya bernama Ahmed Ali, beragama Islam, dan ibunya, Tezeta Wolde, beragama Kristen. Abiy adalah penganut Kristen Pantekosta. Abiy Ahmed berjuang melawan rezim Derg (Dergue), yang memerintah Ethiopia dari tahun 1974-1991, dan kemudian bertugas di Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia, di mana Abiy mencapai pangkat letnan kolonel. Saat bertugas di militer, dan memperoleh gelar sarjana teknik komputer pada tahun 2001 dari Microlink Information Technology College di Addis Ababa. Pada tahun 2007 diangkat menjadi kepala Badan Keamanan Jaringan Informasi, organisasi pemerintah Ethiopia yang bertanggung jawab atas keamanan siber (McKenna 2024).

Setelah meninggalkan militer, pada tahun 2010 Abiy terpilih menjadi anggota DPR sebagai anggota *Oromo People's Democratic Organization* (OPDO), yang merupakan bagian dari koalisi penguasa EPRDF. Pada tahun-tahun berikutnya, Abiy Ahmed melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar master dalam kepemimpinan transformasional (2011) dari *International Leadership Institute*, bekerja sama dengan Greenwich University pada negara London, kemudian gelar master dalam administrasi

bisnis (2013) dari *Leadstar College*, bekerja sama dengan Ashland University pada negara Ohio, dan gelar doktor (2017) dari Addis Ababa University (McKenna, 2024).

Abiy diangkat menjadi menteri sains dan teknologi di pemerintah federal pada tahun 2016, tetapi menjabat hanya dalam waktu singkat dan memutuskan keluar pada bulan Oktober tahun 2016 untuk menjabat sebagai wakil presiden pemerintah daerah Oromia. Di dalam partai OPDO, Abiy terpilih sebagai kepala sekretariat pada tahun 2017. Sementara itu, rencana kontroversial yang diusulkan oleh pemerintah federal yang dipimpin EPRDF untuk memperluas ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, dengan menghubungkan kota tersebut dengan beberapa bagian wilayah Oromia diprotes oleh masyarakat Oromo pada tahun 2015. Tahun berikutnya terjadi lebih banyak protes, yang kini dipicu oleh berbagai keluhan yang lebih luas terhadap pemerintah, yang terjadi di Oromia dan juga di wilayah lain.

Pada awal tahun 2018, pemerintah mulai membuat pendekatan untuk meredakan ketegangan dan mendorong dialog antara dirinya dan kelompok oposisi. Hal ini diikuti oleh pengunduran diri Perdana Menteri Hailemariam Desalegn yang tidak terduga pada bulan Februari, setelah itu Abiy muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikannya. Abiy terpilih sebagai ketua partai OPDO pada bulan Februari, yang menempatkannya sebagai ketua koalisi yang berkuasa di EPRDF, ia terpilih untuk jabatan tersebut pada tanggal 27 Maret. Pada tanggal 2 April, Dewan Perwakilan Rakyat memilihnya sebagai perdana menteri sehingga dilantik pada hari yang sama. Khususnya, Abiy adalah orang Oromo pertama yang menjabat di posisi

tersebut, dan diharapkan bahwa pemilihannya sebagai perdana menteri akan membantu meredakan ketegangan yang tersisa antara masyarakat Oromo dan pemerintah (McKenna, 2024).

2.3.2. Kepemimpinan dan Kebijakan Abiy Ahmed di Ethiopia

Pada masa kepemimpinan Abiy Ahmed yang dimulai pada 2018, Ethiopia mengalami perubahan besar pada bermacam keahlian seperti ekonomi, politik, serta sosial. Abiy Ahmed yang dikenal dengan pendekatan reformisnya mencoba membawa Ethiopia menuju era baru yang lebih terbuka dan inklusif (Setiani and Suleman, 2021). Beberapa kebijakan kunci yang dilaksanakan pada tahun pertama masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1) Pembebasan Tahanan Politik

Abiy Ahmed melakukan langkah signifikan dalam pembebasan tahanan politik pemerintahan yang dipimpin oleh Front Demokratik Rakyat Ethiopia (EPRDF). Pembebasan ini adalah bagian dari upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan kelompok-kelompok oposisi dan memperkenalkan politik yang lebih demokratis.

2) Pembebasan Partai Oposisi dan Kelompok Bersenjata

Sebagai bagian dari reformasi politiknya, Abiy Ahmed juga membebaskan partai-partai oposisi yang sebelumnya dianggap sebagai musuh negara, termasuk beberapa kelompok bersenjata yang dianggap teroris oleh pemerintahan sebelumnya. Langkah ini

menunjukkan niat Abiy untuk mengakhiri politik otoriter dan membuka ruang bagi pluralisme politik di Ethiopia.

3) Pemecatan Pejabat Militer dan Pemerintahan yang Terlibat Korupsi

Sebagai bagian dari upayanya untuk memberantas korupsi, Abiy Ahmed juga memecat beberapa pejabat tinggi militer dan pemerintahan yang terlibat dalam praktik korupsi. Pemecatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Ethiopia.

4) Penguatan Kebebasan Pers

Abiy Ahmed juga melakukan reformasi penting dalam kebebasan pers di Ethiopia. Abiy Ahmed memperbolehkan lebih banyak media independen dan menghapuskan beberapa pembatasan yang selama ini diterapkan pada jurnalis. Kebebasan pers yang lebih luas menjadi bagian dari reformasi untuk meningkatkan transparansi dan memberikan ruang bagi diskusi terbuka dalam masyarakat.

5) Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik dan Sosial

Abiy Ahmed juga memprioritaskan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik dan sosial. Salah satu pencapaian pentingnya dengan penunjukan separuh anggota kabinet yang terdiri dari perempuan, menjadikan Ethiopia menjadi kabinet dengan diisi perempuan terbanyak di dunia. Kebijakan ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan memperjuangkan kesetaraan gender (Setiani and Suleman 2021).

Kebijakan-kebijakan reformis yang diambil oleh Abiy Ahmed pada awal masa pemerintahannya tersebut mendapatkan sambutan positif dalam domestik maupun masyarakat internasional. Abiy Ahmed bahkan dianugerahi Nobel Perdamaian pada 2019 atas upayanya dalam menyelesaikan konflik perbatasan dengan Eritrea dan mendorong reformasi domestik yang besar (Sani 2021). Namun, meskipun langkah-langkah reformasi ini dipuji oleh banyak pihak, ada juga tantangan besar yang muncul di Ethiopia, termasuk ketegangan politik yang meningkat, perpecahan etnis, dan kekerasan yang terjadi antara kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan ini. Konflik yang terjadi di Tigray sejak 2020 menjadi contoh nyata dari dinamika politik yang kompleks di Ethiopia setelah reformasi yang dilakukan oleh Abiy Ahmed sendiri. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun berorientasi pada pembukaan demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan inklusif, juga menunjukkan tantangan besar dalam mencapai stabilitas politik di negara yang sangat terfragmentasi secara etnis dan memiliki sejarah panjang pemerintahan yang otoriter.

2.4. Gambaran Sejarah Konflik Tigray hingga Pada Masa Pemerintahan Abiy Ahmed (2020-2022)

2.4.1. Konflik Tigray Sebelum Masa Pemerintah Abiy Ahmed (2020-2022)

Konflik di Ethiopia utara tumpang tindih dengan konflik lain di negara tersebut, termasuk di wilayah asal Abiy Ahmed di Oromia, tempat pemerintahannya menghadapi ketidakpuasan politik yang meningkat dan

pemberontakan yang semakin meluas. Laporan tentang aliansi militer yang baru lahir antara pemberontak Tigray dan Oromo, dan mungkin kelompok bersenjata lainnya, meningkatkan prospek perang yang lebih luas dan menambah kekhawatiran atas stabilitas Ethiopia. Keterlibatan Eritrea dalam konflik Tigray dan meningkatnya ketegangan antara Ethiopia dan Sudan juga memicu kekhawatiran tentang potensi konflik regional. Ketegangan perbatasan Ethiopia-Sudan telah diperburuk oleh perselisihan Tigray, yang semakin mempersulit upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan atas bendungan baru di Sungai Nil.

Konflik Tigray juga telah membebani peran Ethiopia sebagai penyumbang pasukan utama untuk operasi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut, termasuk di Somalia, tempat Ethiopia telah menarik sebagian pasukannya untuk memperkuat operasi di utara. Konflik Tigray berdampak negatif pada hubungan AS dengan Ethiopia, yang selama ini dipandang sebagai mitra regional strategis dan saat ini merupakan penerima bantuan kemanusiaan dan pembangunan AS terbesar di dunia. Amerika Serikat telah meminta pihak-pihak yang bertikai untuk merundingkan penghentian permusuhan dan menarik pasukan masing-masing dari wilayah yang telah mereka masuki sejak konflik dimulai. Pejabat AS juga telah menyerukan akses kemanusiaan tanpa batas dan diakhirinya serangan terhadap pekerja bantuan. Pemerintahan Biden telah membatasi bantuan keamanan dan beberapa bantuan ekonomi ke Ethiopia berdasarkan alasan HAM, dan telah menjatuhkan beberapa sanksi kepada individu di Ethiopia dan Eritrea karena menjadi pelaku pelanggaran HAM di Tigray. Pemerintah

mengatakan ada bukti yang sangat banyak bahwa militer Eritrea telah terlibat dalam pelanggaran HAM serius di Tigray, serta sedang melakukan peninjauan dalam penentuan pelanggaran HAM di wilayah tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida (Blanchard, 2021).

Konflik Tigray berakar pada ketegangan yang berlangsung beberapa di Ethiopia. Negara ini terdiri dari 10 wilayah dan dua kota yang memiliki otonomi besar, termasuk polisi daerah dan milisi (Mackintosh, 2021). Sebelum terjadi konflik ini, Tigray dan pemerintah Eritrea telah sejak lama bermusuhan di saat keduanya berbagi perbatasan (BBC, 2020). Perselisihan atas wilayah perbatasan ini menjadi penyebab perang antara Ethiopia dan Eritrea pada 1998 sampai 2000 (Sari, 2022). Masyarakat Tigray telah lama menjadi pusat kekuatan politik di Ethiopia yaitu selama 30 tahun, Masyarakat Tigray memiliki kontrol atas pemerintahan Ethiopia. Kelompok etnis Tigray, meskipun hanya mencakup sekitar 6,1% dari populasi Ethiopia, telah lama menjadi pusat kekuatan politik. Dominasi ini tidak lepas dari peran *Tigray People's Liberation Front* (TPLF), dimana sebuah kelompok gerilya yang berubah menjadi partai politik terkuat di Ethiopia (Puspita, 2022).

Periode Perang Saudara (1974–1991), sejak 1974, Ethiopia mengalami perang saudara yang dipicu oleh ketidakpuasan etnis, penindasan pemerintah, dan perebutan kekuasaan. Masyarakat Tigray, melalui TPLF, memainkan peran besar dalam melawan rezim otoriter yang dipimpin oleh Mengistu Haile Mariam. Kemudian tahun 1984, terjadi

Kelaparan Ethiopia. Selama periode ini, Ethiopia juga dilanda bencana kelaparan yang sangat parah, yang menewaskan sekitar 1 juta orang. Bencana ini menjadi simbol kegagalan rezim Mengistu dalam mengelola negara, memperburuk situasi politik, dan memperkuat perjuangan kelompok-kelompok pemberontak, termasuk TPLF. Pada tahun 1989, TPLF bergabung dengan golongan pemberontak untuk membentuk EPRDF. Koalisi ini menjadi kekuatan utama yang berhasil menggulingkan rezim Mengistu (Puspita, 2022).

Pada tahun 1991, perang saudara berakhir dengan kemenangan EPRDF, yang menggulingkan rezim Mengistu Haile Mariam. Kemenangan ini membawa perubahan besar dalam politik Ethiopia yaitu (1) penggulingan Rezim Mengistu, yang dikenal represif digantikan oleh pemerintahan baru di bawah EPRDF. TPLF, sebagai anggota utama EPRDF, memperoleh posisi politik yang dominan. (2) Kemerdekaan Eritrea, setelah perang saudara berakhir, Eritrea, yang sebelumnya bagian dari Ethiopia, memisahkan diri dan menjadi negara merdeka pada 1993. (3) Dominasi TPLF di EPRDF, sejak 1991 menjadi partai paling dominan dalam EPRDF dan mengontrol sebagian besar aspek politik, militer, dan ekonomi Ethiopia selama hampir 30 tahun (Puspita et al. 2022). Periode ini menandai pengaruh besar orang-orang Tigray dalam pemerintahan.

Periode setelah 2018, konflik bersenjata Tigray-Ethiopia terjadi antara kelompok politik TPLF dan pemerintah Ethiopia. Konflik ini berawal sejak EPRDF, menjadi partai yang memerintah sudah hampir 30 tahun lamanya yang dilatar belakangi pemerintahan yang kotor, korup, dan juga

diskriminatif terhadap minoritas. EPRDF berkoalisi dengan empat partai yaitu ADP, ODP, SEPDP, serta TPLF. Pada ke-4 partai tersebut yang paling menonjol adalah TPLF karena memiliki keistimewaan hak dari EPRDF. Hak istimewa tersebut menjadikan TPLF mempunyai pengaruh serta posisi militer strategis dan menjadikan partai lain terpinggirkan (Aflah, 2023).

2.4.2. Konflik Tigray Pada Masa Pemerintah Abiy Ahmed (2020-2022)

Konflik Tigray dikategorikan sebagai permasalahan bersenjata internal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kelompok revolusioner di Tigray serta menjadi yurisdiksi negara Ethiopia yang dimulai sejak November 2020. Ethiopia seharusnya mengadakan pemilu nasional pada 9 September 2020 untuk memilih pemerintahan baru. Namun, PM Abiy Ahmed melakukan penundaan pemilu tersebut karena munculnya Covid-19. Penundaan ini menimbulkan kekecewaan, terutama di kalangan TPLF dan wilayah Tigray. Masa jabatan Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri seharusnya berakhir pada 5 Oktober 2020, tetapi dengan tidak adanya pemilu, Abiy Ahmed tetap mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri tersebut. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa Abiy Ahmed menggunakan alasan pandemi untuk memperpanjang kekuasaan secara tidak sah.

Sebagai respon dari TPLF, TPLF menyelenggarakan pemilu regional di wilayah Tigray pada September 2020, yang dianggap ilegal oleh pemerintah pusat Ethiopia. Pemilu ini menunjukkan perlawanan politik TPLF terhadap pemerintah pusat dan semakin memperburuk hubungan

kedua pihak. Pada tanggal 4 November 2020, Abiy Ahmed mengumumkan bahwa pasukan Tigray telah menyerang basis militer Ethiopia di wilayah Tigray. Serangan ini melibatkan perampasan senjata dan bentrokan dengan pasukan nasional. Pemerintah Ethiopia merespons dengan meluncurkan operasi militer besar-besaran terhadap TPLF. Abiy Ahmed menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan memulihkan ketertiban di wilayah Tigray. Pada hari yang sama, pemerintah Ethiopia memberlakukan *state of emergency* di wilayah Tigray, yang memberi pemerintah pusat wewenang lebih besar untuk mengendalikan situasi. Langkah ini diikuti oleh blokade komunikasi dan pembatasan akses kemanusiaan ke wilayah tersebut konflik antara TPLF dan Pemerintah Ethiopia terus meningkat menjadi perang yang melibatkan berbagai pihak dan meluas ke wilayah di luar Tigray. Dalam hal ini, TPLF mengunci perbatasan wilayah udara dan perbatasan akses wilayah darat, yang mengisolasi wilayah Tigray dari pemerintah pusat Ethiopia. Selain itu, TPLF mengeluarkan misil kepada bandar udara utama Eritrea dan Provinsi Amhara, menandakan eskalasi konflik secara regional. Serangan TPLF ini memperparah hubungan mereka dengan wilayah tetangga dan menimbulkan kekhawatiran internasional karena dampaknya meluas ke Eritrea (Puspita, 2022).

Eritrea, yang sebelumnya memiliki hubungan buruk dengan Ethiopia dan TPLF, justru memilih berpihak pada pemerintah pusat Ethiopia. Eritrea mengirimkan Eritrean Defense Forces (EDF) untuk membantu Ethiopian National Defense Forces (ENDF) melawan TPLF. Tigray merupakan tempat

tinggal bagi sekitar 100.000 pengungsi Eritrea yang dilindungi dengan UNHCR. Konflik ini membuat para pengungsi berada dalam situasi berbahaya karena banyak yang menjadi target kekerasan dan beberapa pengungsi dibunuh, sementara yang lain dipulangkan secara paksa ke Eritrea di tengah situasi yang mengancam keselamatan. Tindakan Pemerintah Ethiopia yaitu melakukan pemblokiran akses dan sensor informasi untuk mengendalikan narasi konflik, pemerintah Ethiopia memblokir akses internet di wilayah konflik; menghalangi wartawan dan organisasi internasional untuk meliput atau memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian dilakukan gencatan senjata sejak Juni 2021, Ethiopia mengumumkan perdamaian untuk menghentikan perang untuk menyerah setelah TPLF berhasil diambil Mekelle, ibu kota Tigray. TPLF membuat konflik kembali dan memperluasnya hingga wilayah Amhara dan Afar (Puspita, 2022). Perluasan konflik ini semakin memperburuk situasi nasional Ethiopia, menciptakan ketidakstabilan yang melibatkan wilayah baru dan meningkatkan penderitaan penduduk sipil.

Sejak Abiy Ahmed yang berasal dari *Oromo Democratic Party* (ODP) menjadi perdana menteri baru Ethiopia, Abiy Ahmed menunjukkan gerakannya yang signifikan terhadap TPLF. Kemudian, keterlibatan Eritrea di dalam konflik ini, semakin memperluas spektrum krisis. Kebuntuan solusi dan klaim sepihak atas keberhasilan Abiy Ahmed dalam menangani TPLF, semakin menyudutkan posisi Tigray baik dalam negeri maupun luar negeri, yang diperparah dengan penurunan kondisi masyarakat Tigray di tengah situasi pandemi Covid-19 (Aflah, 2023).

Konflik ini segera meningkat menjadi konflik regional dengan melibatkan aktor-aktor lainnya, seperti pasukan Eritrea, Somalia, dan pasukan khusus Amhara. Berdasarkan pada berbagai sumber menyampaikan adanya keterlibatan aktor-aktor tersebut dalam konflik Tigray, meskipun pernyataan tersebut ditentang oleh mereka. Pasukan TPLF memerangi *Ethiopian National Defense Force* (END), Polisi Federal Ethiopia, polisi regional, dan pasukan dari wilayah Amhara dan Afar yang berdekatan dengan keterlibatan *The Eritrean Defence Force* (EDF), dan *Tigray Special Forces* (TSF) (Amnesty International 2020). Perdana Menteri Abiy memperkuat pasukannya dengan mengerahkan pejuang milisi dari Amhara, selatan Tigray, menyapu Tigray barat di tengah tuduhan serangan terhadap warga sipil. Kemudian pasukan dari Eritrea, membanjiri perbatasan ke Tigray dari utara untuk bertempur bersama pasukan PM Abiy Ahmed.

Pasukan federal dan sekutu mereka dengan cepat menguasai ibukota regional Tigray, Mekelle, dan kota-kota lain. Kelompok TPLF dengan cepat diusir dari ibu kota mereka, dan sebagian besar wilayah segera berada di tangan Ethiopia dan Eritrea. Namun, Tigrayan yang tergabung dalam TPLF terus berjuang dan pada Juni 2021 mengubah keadaan dengan berhasil menguasai Mekelle ketika mereka meluncurkan apa yang mereka sebut “Operasi Alula Aba Nega,” atau “Operasi Alula”. Peristiwa ini diikuti oleh tawaran Ethiopia untuk gencatan senjata sepihak, tetapi tawaran itu tidak diterima dengan baik oleh TPLF yang menunjukkan bahwa pasukan Ethiopia, Eritrea, dan Amhara tetap berada di Tigray. Perdana Menteri Abiy Ahmed kemudian menyerukan warga sipil bergabung ke dalam militer

untuk berpartisipasi memerangi TPLF dan merebut kembali wilayah yang telah diambil oleh kelompok pemberontak tersebut (Sari et al. 2022).

2.5. Dampak Konflik Tigray

Konflik yang berlangsung hampir dua tahun telah berdampak parah pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Estimasi oleh Profesor Jan Nyssen di Universitas Ghent menunjukkan bahwa, hingga Agustus 2022, sebanyak 600.000 orang telah tewas dalam konflik tersebut: antara 31.300 hingga 89.300 warga sipil telah terbunuh atau dibantai; antara 228.000 hingga 356.100 orang telah meninggal karena kelaparan; dan antara 124.000 hingga 155.000 orang telah meninggal karena kurangnya perhatian medis (Evennett, 2022).

Washington Post menyebut konflik Tigray sebagai perang paling mematikan di dunia, dimana warga sipil di Ethiopia utara menghadapi kelaparan massal dan etnosida. Pada bulan November 2021, wilayah tersebut berada di bawah blokade sistematis, dengan peringatan bahwa masyarakat sekarat karena kurangnya pasokan konsumsi makanan. Pada awal tahun 2022, situasi tersebut dikatakan sebagai penghinaan terhadap kemanusiaan. Konflik tersebut memperburuk masalah yang disebabkan oleh kekeringan parah di negara tersebut. Program Pangan Dunia menyatakan: Konflik di Ethiopia Utara telah hampir menghabiskan mekanisme penanganan jutaan orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Lebih dari 13 juta orang membutuhkan bantuan pangan kemanusiaan terutama di zona yang terkena dampak konflik di wilayah Afar, Amhara, dan Tigray. Pada bulan Agustus 2021, Ethiopia untuk

sementara menanggukkan pekerjaan dua lembaga bantuan internasional, MSF dan NRC, dengan alasan mereka telah menyebarkan informasi yang salah. Kemudian, pada bulan Januari 2022, banyak lembaga bantuan menanggukkan bantuan ke Tigray setelah serangan udara yang menghantam sebuah kamp bagi para pengungsi di wilayah tersebut medis (Evennett, 2022).

Pada bulan April 2022, laporan bersama oleh *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* menemukan bahwa sejak November 2020 di Tigray bagian barat, Otoritas sipil, dan pasukan keamanan regional Amhara, dengan persetujuan serta kemungkinan partisipasi pasukan federal Ethiopia, melakukan banyak pelanggaran berat karena berbagai konflik yang meluas dan terstruktur pada masyarakat biasa negara Tigray yang merupakan kejahatan HAM serta kejahatan perang. Kejahatan ini meliputi pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, deportasi atau pemindahan paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual dan kekerasan seksual lainnya, penganiayaan, pemenjaraan yang tidak sah, kemungkinan pemusnahan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya (Evennett, 2022).

Konflik Tigrey antara Pemerintah Ethiopia dan Etnis Tigray akibat perebutan kekuasaan dan seruan reformasi politik telah menimbulkan akibat yang terasa dalam penurunan ekonomi, ketegangan politik, maupun sosial dalam kehidupan masyarakat (Lumintosari, 2021).

- 1) Dampak terhadap Pasokan Makanan dan Kesehatan
 - a) Pemblokiran Akses oleh Pemerintah Ethiopia

Pemerintah Ethiopia menutup semua akses menuju Tigray, termasuk distribusi bahan pangan, yang menyebabkan krisis kelaparan. Harga pangan melonjak, dan persediaan makanan semakin menipis, memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terdampak konflik.

b) Penutupan Akses Komunikasi

Pemerintah memutuskan aliran telepon dan internet, membuat masyarakat Tigray terisolasi. Informasi mengenai situasi dan kondisi di wilayah tersebut menjadi sulit diakses, sehingga menghambat koordinasi bantuan kemanusiaan.

c) Kondisi Rumah Sakit yang Memprihatinkan

Rumah sakit di Tigray hanya dapat beroperasi dengan bantuan generator berbahan bakar solar. Dengan akses bahan bakar yang terbatas, layanan kesehatan menjadi sangat terganggu.

2) Eskalasi Konflik oleh Intervensi Eritrea

a) Dendam Eritrea terhadap Tigray

Eritrea, yang memiliki sejarah konflik panjang dengan Tigray, turut campur dalam konflik ini. Pasukan Eritrea diduga bekerja sama dengan pemerintah Ethiopia untuk meluncurkan serangan terhadap TPLF.

b) Blokade dan Pendudukan Mekelle

Tentara federal Ethiopia berhasil merebut Mekelle, ibu kota Tigray, dan memblokade wilayah tersebut, menghambat akses media dan bantuan internasional.

3) Krisis Pengungsi

a) Migrasi ke Sudan

Banyak warga Tigray, terutama perempuan dan anak-anak, melarikan diri ke Sudan untuk mencari perlindungan. Mereka menghadapi kelelahan fisik dan trauma akibat konflik. Para pengungsi membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak, termasuk makanan, air bersih, dan tempat tinggal.

b) Krisis Kemanusiaan

Konflik ini menciptakan krisis kemanusiaan yang parah. Situasi ini mengurangi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat Tigray. Sulitnya akses terhadap kebutuhan pokok seperti minuman, makan, serta rumah yang aman, semakin memperburuk kondisi masyarakat. Krisis kemanusiaan ini membutuhkan intervensi kemanusiaan untuk mengatasi dampak jangka panjang. Bantuan internasional mulai masuk pada Desember 2020, saat konflik sedikit mereda, memungkinkan sebagian penduduk Mekelle untuk meninggalkan kota tersebut.

4) Pelanggaran HAM dan Perpecahan Sosial

Konflik ini telah menciptakan lingkungan yang rawan terhadap pelanggaran HAM besar-besaran, termasuk pembantaian, kekerasan seksual, serta penyiksaan. Ketegangan etnis semakin mendalam, memperburuk perpecahan di masyarakat Ethiopia dan menciptakan potensi konflik yang lebih luas di masa depan (Lumintosari, 2021).

Konflik di wilayah Tigray, Ethiopia, telah memicu krisis kemanusiaan berskala besar dan menarik perhatian internasional, di tengah laporan tentang kelaparan dan kekejaman. Perang tersebut telah menelan banyak korban manusia dan ekonomi, dan menyebar ke luar Tigray. Pemerintah Ethiopia telah menolak berbagai seruan untuk perundingan damai dengan pemberontak Tigray, dan dikepalai dengan TPLF (Blanchard, 2021). Perang telah memberikan dampak yang menghancurkan bagi Tigray, dan semakin mengancam daerah-daerah di sekitarnya. Dampak negatif dari konflik Tigray bagi warga Tigray di Ethiopia diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Rekening bank mereka dibekukan
- 2) Dilarang meninggalkan negara (Warga Tigray tidak diperbolehkan terbang)
- 3) Dipecat dari pekerjaan mereka di perusahaan milik negara dan swasta
- 4) Setidaknya 76 perusahaan bisnis warga Tigray dilarang beroperasi di Ethiopia
- 5) Ribuan orang ditahan di kamp konsentrasi tanpa pengadilan
- 6) 36 perusahaan konglomerat bernilai miliaran dolar dari Dana Abadi Tigray disita, dijarah, atau dihancurkan
- 7) Hingga 6 Januari 2021 terdapat 4,5 juta orang membutuhkan bantuan darurat (Resmi); 2,3 anak membutuhkan bantuan (UNICEF); 2,2 juta pengungsi internal (Resmi) dan terkonsentrasi di bagian tengah Tigray seperti Axum, Adwa, Adigrat, Abiy-Adi, Mekelle. Sekitar 1,1 juta

pengungsi internal mata pencahariannya hancur/dibakar/dijarah dan +57.000 pengungsi mengungsi ke Sudan (Atsbha 2021).

2.6. Gambaran Umum Uni Afrika

2.6.1. Uni Afrika Sebagai Organisasi Regional Kawasan Afrika

Uni Afrika (AU) merupakan badan kontinental yang terdiri dari 55 negara anggota yang membentuk negara-negara di Benua Afrika. Badan ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2002 sebagai penerus Organisasi Persatuan Afrika (OAU, 1963-1999) (The African Union Commission, 2022). Sejarah AU yaitu pada tanggal 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, 32 negara Afrika yang telah mencapai kemerdekaan pada saat itu sepakat untuk mendirikan Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Sebanyak 21 anggota lainnya bergabung secara bertahap, sehingga totalnya menjadi 53 pada saat pembentukan Afrika Union (AU) pada tahun 2002. Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi anggota Uni Afrika (AU) ke-54 (USAID, 2023).

Organisasi Persatuan Afrika (OAU) lahir sebagai cerminan dari semangat pan-Afrikanisme, yaitu cita-cita untuk membentuk Afrika yang bersatu, merdeka, dan berdaulat atas nasibnya sendiri. Visi ini tertuang dalam Piagam OAU, yang ditegaskan oleh para pendirinya sebagai komitmen terhadap nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan martabat sebagai landasan utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Afrika. Para pemimpin Afrika pada saat itu menyadari pentingnya memperkuat pemahaman antarbangsa di dalam benua serta mendorong kerja sama yang

erat antarnegara sebagai respons terhadap keinginan rakyat Afrika untuk membangun solidaritas dan persaudaraan yang melampaui sekat-sekat etnis dan nasional. Gagasan utama yang menjadi landasan OAU adalah filsafat Pan-Afrikanisme, yang menekankan sosialisme khas Afrika, nilai-nilai komunal dalam masyarakat, serta pelestarian budaya dan warisan Afrika sebagai kekuatan pemersatu (The African Union Commission, 2022). Organisasi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk mendorong integrasi, memperkuat kerja sama, dan mempererat persatuan di antara negara-negara Afrika, sembari mengangkat posisi Afrika dalam percaturan global (Wijayanti, 2022).

Kemudian, pada Juli 2002, Uni Afrika (UA) resmi diluncurkan di Durban, Afrika Selatan, menggantikan OAU sebagai bentuk pembaharuan kelembagaan. Pembentukan ini didasarkan pada keputusan yang diambil oleh OAU pada September 1999, yang dilandasi kesepakatan para pemimpin Afrika bahwa perjuangan politik masa lalu seperti dekolonisasi dan penghapusan apartheid telah membuka jalan bagi fokus baru. Maka, perhatian pun dialihkan menuju penguatan integrasi dan kerja sama antarnegara demi mendorong pembangunan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di benua Afrika. UA mengusung visi jangka panjang yakni terwujudnya Afrika yang bersatu, sejahtera, dan damai, yang digerakkan oleh warganya sendiri serta menjadi kekuatan aktif dan berpengaruh di tingkat global (The African Union Commission, 2022).

2.6.2. Tujuan dan Prinsip Uni Afrika

Pasal 3 *Constitutive Act of African Union* menjelaskan bahwa Uni Afrika memiliki tujuan yaitu untuk:

- (b) Mencapai persatuan dan solidaritas yang lebih besar antara negara-negara Afrika dan rakyat Afrika.
- (c) Mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan Negara-negara Anggota.
- (d) Mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi benua.
- (e) Mempromosikan dan mempertahankan posisi bersama Afrika pada isu-isu yang menjadi kepentingan benua dan rakyatnya.
- (f) Mendorong kerja sama internasional, dengan mempertimbangkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- (g) Mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua.
- (h) Mempromosikan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga demokrasi, partisipasi rakyat, dan pemerintahan yang baik.
- (i) Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat sesuai dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya yang relevan.
- (j) Menetapkan kondisi-kondisi yang diperlukan yang memungkinkan benua tersebut untuk memainkan peran yang semestinya dalam ekonomi global dan dalam negosiasi-negosiasi internasional.

- (k) Memajukan pembangunan berkelanjutan di tingkat ekonomi, sosial dan budaya serta integrasi ekonomi-ekonomi Afrika.
- (l) Memajukan pembangunan benua dengan mempromosikan penelitian di semua bidang, khususnya di bidang sains dan teknologi
- (m) Bekerja sama dengan mitra internasional terkait dalam pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dan peningkatan kesehatan yang baik di benua tersebut (Constitutive Act of African Union, 2000).

Prinsip-prinsip Uni Afrika diatur dalam Pasal 4 *Constitutive Act of African Union* sebagai berikut:

- (a) Kesetaraan kedaulatan dan saling ketergantungan di antara Negara-negara Anggota Uni Afrika
- (b) Penghormatan terhadap batas-batas yang ada setelah tercapainya kemerdekaan.
- (c) Partisipasi masyarakat Afrika dalam kegiatan-kegiatan Uni Afrika
- (d) Penetapan kebijakan pertahanan bersama untuk Benua Afrika.
- (e) Penyelesaian konflik secara damai di antara negara-negara anggota serikat melalui cara-cara yang tepat sebagaimana diputuskan oleh Majelis.
- (f) Larangan penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan di antara Negara-negara Anggota Serikat.
- (g) Tidak adanya campur tangan oleh Negara Anggota mana pun dalam urusan internal negara lain.

- (h) Hak Serikat untuk campur tangan di Negara Anggota berdasarkan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan yang serius, yaitu: kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- (i) Hidup berdampingan secara damai di antara Negara-negara Anggota dan hak mereka untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan.
- (j) Hak Negara-negara Anggota untuk meminta intervensi dari Serikat dalam rangka memulihkan perdamaian dan keamanan.
- (k) Promosi kemandirian dalam kerangka Serikat.
- (l) Promosi kesetaraan gender
- (m) Penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik.
- (n) Promosi keadilan sosial untuk memastikan pembangunan ekonomi yang seimbang
- (o) Penghormatan terhadap kesucian hidup manusia, kutukan dan penolakan terhadap impunitas dan pembunuhan politik, tindakan terorisme dan kegiatan subversif.
- (p) Mengutuk dan penolakan terhadap perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional (Constitutive Act of African Union, 2000).

2.7. Uni Afrika dalam Penanganan Konflik di Tigray

Pada konflik di Tigray, Uni Afrika (UA) mengambil sikap proaktif dengan menyampaikan keprihatinannya terhadap eskalasi kekerasan yang telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan Uni Afrika terhadap eskalasi konflik di Tigray, sekaligus sebagai seruan agar seluruh pihak yang terlibat

segera menghentikan aksi kekerasan dan mengupayakan penyelesaian melalui jalur damai. Uni Afrika secara tegas menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam konflik tersebut, dan menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap warga sipil. Organisasi ini juga mendorong semua pihak untuk menghentikan pertempuran, menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk keadaan, dan mengutamakan pendekatan dialogis dalam mencari solusi (Wijayanti, 2022).

AU mendapatkan tugas khusus pada komisi *African Commission on Human and Peoples Rights* (ACHPR). AU setidaknya memberikan tiga mandat terhadap ACHPR yaitu, promosi hak asasi manusia dan rakyat, perlindungan hak asasi manusia dan rakyat, dan interpretasi Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat. Kedua organisasi tersebut membentuk kerjasama dan membuat sebuah protokol, yang kemudian disahkan dalam Sidang Tinggi AU dan dijuluki Protokol Maputo. Protokol Maputo disahkan pada tahun 2003 dan mulai diberlakukan pada tahun 2005 (Molasy, 2024).

AU telah memainkan peran penting dalam menangani konflik di wilayah Tigray, Ethiopia. Menjadi organisasi kawasan yang bertujuan dalam mempromosikan perdamaian serta keamanan di Afrika, kemudian UA telah mengambil sejumlah langkah untuk meredakan konflik dan mendorong solusi damai, diantaranya yaitu:

- 1) Uni Afrika sebagai fasilitator dalam perumusan perdamaian

UA berperan aktif dalam memfasilitasi proses perundingan damai antara pihak-pihak yang bertikai, yaitu TPLF. Sebagai

fasilitator, Uni Afrika menyediakan platform netral untuk mengadakan diskusi, memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, Uni Afrika berupaya membangun kepercayaan dan mempersiapkan landasan yang kondusif untuk dialog.

2) Uni Afrika sebagai mediator dalam perumusan perdamaian

UA sebagai mediator, mengambil peran yang lebih proaktif dengan menunjuk utusan khusus untuk konflik Ethiopia. Mediator ini bertugas menengahi konflik, menjembatani perbedaan antara pihak yang bertikai, dan membantu mencari solusi yang akan menjadi konsensus perdamaian. Uni Afrika juga memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara adil dan seimbang, dengan fokus pada penghentian kekerasan dan pemulihan stabilitas di wilayah tersebut (Gunawan, 2024).

3) Uni Afrika sebagai rekonsiliator dalam penciptaan gencatan senjata

UA bertindak sebagai rekonsiliator untuk memastikan bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat dicapai dan diimplementasikan dengan baik. Peran ini mencakup pemantauan pelaksanaan gencatan senjata, mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan oleh semua pihak, serta memfasilitasi langkah-langkah menuju rekonsiliasi jangka panjang. Fokus utamanya adalah memastikan penghentian kekerasan yang berkelanjutan, memulihkan akses kemanusiaan, dan menciptakan kondisi untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. (Wijayanti, 2022).